

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- _____, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. (Malang: Setara Press, 2016).
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Konpress, 2018).
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Paul: West Publishing, 1990).
- Dirdjosworo, Soedjono. *Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasyarakatan)*. (Bandung: Amico, 1992).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penaganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Huda, Ni'Matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Huda, UU Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu di Indonesia*. (Bandung: FOKUSMEDIA, 2018).
- Isra, Saldi. *Pemilu dan Pemilihan Daulat Rakyat*. (Jakarta: Themis Publishing, 2017).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016).

- Kusuma, Hilman Hadi. *Bahasa Hukum Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1992).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2013).
- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Eska Media, 2003).
- Purbacaraka, Purnadi. *Perihal Kaidah Hukum*. (Bandung: Opset Alumni, 1979).
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2015).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Soeprapto. Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 2006).
- _____, *Ilmu Perundang-Undangan 2*. (Yogyakarta: Kanisius, 2006).
- _____, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Almuni, 1996).
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

B. MAKALAH/JURNAL

- Bidara, Olden. "Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Teori dan Praktek Pemerintahan." *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994).
- Handayani, Yeni. "Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Rechtsvinding*, Tahun 2014.
- Kurnisar. "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum di Indonesia." *Ejournal Undiksha*, Vol.11, No.3.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).*

_____. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387). jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).*

_____. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).*

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).*

_____. *Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610).*

_____. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).*

Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).*

Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.*

D. INTERNET

- Haryadi, Malvyandie. “Inilah Tiga Residivis Korupsi: Mulai Bupati Hingga Ketua DPRD.” <https://www.tribunenews.com/nasional/2018/01/06/inilah-tiga-residivis-korupsi-mulai-bupati-hingga-ketua-dprd?page=2>, 01 Maret 2019.
- Farisa, Fitria Chusna. “Daftar 81 Caleg Eks Koruptor.” <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor?page=all>, 01 Maret 2019.
- Indonesia Corruption Watch. “KPU Harus Jalan Terus Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg”. <https://www.antikorupsi.org/id/siaran-pers/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-napi-korupsi-nyaleg>, 10 Juni 2019.
- Indonesia Corruption Watch. “Pemilihan Umum Tanpa Koruptor.” <https://www.antikorupsi.org/id/news/pemilihan-umum-tanpa-koruptor>, 10 Juni 2019 .
- Komara, Indra. “Pernah Jadi Napi Korupsi, M Taufik Resmi Daftar Caleg.” <https://news.detik.com/berita/d-4121677/pernah-jadi-napi-korupsi-m-taufik-resmi-daftar-caleg>. 18 Juni 2019.
- Partai Gerindra. Alamat DPP, DPD, DPC, dan Sayap Partai Gerindra. <http://partaigerindra.or.id/alamat-dpp-dpd-dpc-dan-sayap-partai-gerindra>. 18 Juni 2019.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ANGGOTA>. 5 Agustus 2019.

